

Editorial

Para pembaca yang budiman, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi pada tahun ini kembali berhasil meningkatkan peringkat di bidang pengelolaan jurnal. Melalui Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 148/M/KPT/2020, menyatakan bahwa Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi telah **naik peringkat** ke sinta 4 mulai Volume 19 No 2 Tahun 2020.

Pencapaian tersebut merupakan hasil nyata, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan terbitan. Kami terus merekrut editor dan reviewer yang memiliki kompetensi dan reputasi pada rumpun ilmu yang relevan serta tim teknis untuk mengawal proses penerbitan sesuai prosedur. Rekrutmen tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang relevan dengan ruang lingkup dan memajukan keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengembangan ruang lingkup dan pendalaman keilmuan juga dilakukan oleh jurnal dengan menerbitkan artikel yang bertema relevan dan isu-isu mutakhir, seperti yang diterbitkan pada nomor kali ini.

Artikel pertama ditulis oleh **Theodorus Pangalila & Jeane Mantiri** yang membahas model pendidikan toleransi dari masyarakat kota Tomohon-Sulawesi Utara. Masyarakat kota Tomohon hidup dalam suasana penuh toleransi di tengah perbedaan agama, suku, ras, bahasa dan budaya. Temuan penelitian ini mengungkapkan nilai budaya/kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara: *Si Tou Timou Tumou Tou* (Manusia Hidup untuk Memanusiakan Orang Lain), *Mapalus* (Gotong-royong) dan *Torang Samua Basudara* (Kita Semua Bersaudara) mampu membuat masyarakat Sulawesi Utara hidup dalam suasana penuh toleransi, sehingga bisa diadopsi dan dikembangkan menjadi model pendidikan toleransi. Ketiga nilai budaya ini terimplementasi secara kongkrit dalam kehidupan kongkrit masyarakat yang tidak membedakan asal-usul suku, agama, etnis dari masyarakat. Kajian seperti ini penting karena menjadi kebutuhan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus membangun toleransi yang berbasis kearifan lokal. Penulis merekomendasikan penelitian lanjut tentang pengembangan model pembelajaran berbasis nilai budaya lokal di Indonesia.

Artikel terpilih selanjutnya ditulis oleh **Amelia Haryanti & Dindin** yang memaparkan upaya melaksanakan pemerataan kualitas dan mutu pendidikan di Kota Tangerang Selatan melalui implementasi sistem zonasi pada PPDB berdasar kebijakan Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Peneliti menemukan pelaksanaan PPDB tahun 2020 untuk jenjang tingkat SMP Negeri di kota Tangerang Selatan sudah mengacu pada peraturan Permendikbud No. 44 Tahun 2019, sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan Permendikbud ini adalah daya tampung sekolah negeri yang belum dapat memenuhi kebutuhan lulusan, serta masih banyaknya calon wali murid yang belum memahami diberlakukannya sistem zonasi. Kajian ini aktual dan penting karena PPDB harus diarahkan dengan mengutamakan prinsip keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Peneliti merekomendasikan dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat meningkatkan sarana dan prasarana sekolah negeri dan melakukan sosialisasi tentang sistem zonasi kepada masyarakat jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB.

Nomor kali ini juga menyajikan tiga artikel dengan tema Pendidikan dan Resolusi Konflik. Pertama, **Yuni Harmawati, Bunyamin Maftuh & Elly Malihah** menyampaikan hasil penelitian pengembangan desain model pembelajaran resolusi konflik. Desain pengembangan ini diproyeksikan dapat diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Pengembangan dilakukan peneliti dengan menyadur *desain playing with conflict* yang pernah ditulis oleh Richard B. Powers dan Kat Kirkpatrick. Peneliti melakukan penyesuaian dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia sehingga dapat diimplementasikan di Indonesia dengan sintaksis yang baru. Model pembelajaran ini diorientasikan untuk membentuk keterampilan resolusi konflik dasar, yakni belajar untuk mendengarkan orang lain, belajar berbicara namun menghormati orang lain, belajar mengambil keputusan.

Artikel selanjutnya merupakan karya **Aris Riswandi Sanusi, Bunyamin Maftuh & Elly Malihah** yang bertujuan mengetahui upaya yang dilakukan Universitas Buana Perjuangan dalam membentuk

kemampuan resolusi konflik mahasiswa. Tim peneliti menemukan upaya yang dilakukan Universitas Buana Perjuangan Karawang dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya dan kemampuan resolusi konflik mahasiswa dilakukan dengan cara pelebagaan melalui orientasi pegawai dan mahasiswa, pembentukan satuan pengawas internal dan lembaga penyelesaian konflik, serta upaya edukatif yang dilakukan melalui kolaborasi pelatihan kepemimpinan, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Jatidiri Bangsa.

Artikel terakhir dengan tema Pendidikan dan Resolusi Konflik dari **Erwin Susanto, Bunyamin Maftuh & Elly Malihah & Dasim Budimansyah** bertujuan untuk melihat faktor penyebab terjadinya konflik antar lembaga swadaya masyarakat di Karawang dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menangani konflik tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan konflik yang telah dilakukan dari pihak terkait adalah tindakan tegas seperti menjatuhkan pidana kepada pelaku kerusuhan. Selain itu, pemicu konflik yang paling dominan adalah faktor ekonomi, yakni perebutan limbah perusahaan yang bernilai ekonomis. Penulis menyampaikan bahwa terbentuknya organisasi kemasyarakatan ini yaitu untuk terjaminnya kebebasan individu, namun di sisi lain bisa berdampak negatif bagi ketertiban masyarakat dengan dalih kebebasan bertindak, berpendapat dan berserikat dilindungi oleh negara. Kajian ke tiga artikel di atas sangat strategik karena konflik sudah menjadi bagian kehidupan bermasyarakat sehingga diperlukan metode atau model penyelesaian konflik yang solutif.

Artikel penutup nomor kali ini oleh **Yoga Ardian Feriandi, Elly Malihah & Bunyamin Maftuh** yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik masyarakat samin dan mengungkapkan penyebab resistennya masyarakat samin terhadap perubahan serta bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat samin yang pro dan resisten terhadap perubahan. Para penulis mengungkapkan beberapa faktor utama mengapa masyarakat samin resisten terhadap pembangunan modernitas, antara lain terdiri dari faktor sosio kultural, faktor etika lingkungan, dan faktor ekonomi. Hal itu disebut berkaitan dengan menunjukkan bahwa masyarakat samin memiliki karakteristik utama yakni: sederhana, jujur, resisten terhadap kemodernan, dan cinta lingkungan. Artikel ini menarik karena semakin meyakinkan publik bahwa Bhinneka Tunggal Ika ada kenyataan yang tetap dirawat oleh bangsa Indonesia

Demikian paparan singkat artikel yang dipublikasikan Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi nomor kali ini. Selamat membaca!

Muhammad Japar

^a Editor, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi
Universitas Negeri Jakarta
mjapar@unj.ac.id
 <https://orcid.org/0000-0002-9719-765X>

Fauzi Abdillah

^b Managing Editor, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi
Universitas Negeri Jakarta
abdillah@unj.ac.id
 <https://orcid.org/0000-0001-6024-0610>